



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA



LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER I
ESELON I



20

22

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSDM Hukum dan HAM adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Hukum dan HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSDM Hukum dan HAM. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Depok, 1 September 2022
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Asep Kurnia
NIP 196611191986031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan Keuangan	iv
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional.....	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	36
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	54
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	62
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	68
VI. Lampiran dan Daftar.....	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Depok, 1 September 2022
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Asep Kurnia
NIP 196611191986031001

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Semester I Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja periode yang berakhir per 30 Juni TA 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.153.456.637,00 atau mencapai 206% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.047.500,000,00.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp1.766.990.891,00 atau mencapai 163% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.081.139.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2022. Nilai Aset per 30 Juni TA 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.440.016.748.404,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp4.294.288.297,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.433.225.825.564,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.496.634.543,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp9.024.755.989,00 dan Rp1.430.991.992.415,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp432.573.628,00

sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp100.837.706.822,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp100.405.133.194,00). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.795.445.691,00 dan (Rp98.609.687.503,00) sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp98.609.687.503,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal periode yang berakhir per 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp1,444,031,040,202,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp98.609.687.503,00) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai (Rp476.300.693,00) dan transaksi antar entitas senilai Rp86.046.940.409,00 kenaikan/penurunan ekuitas (Rp13.039.047.787,00) sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni TA 2022 adalah senilai Rp1.430.991.992.415,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I TA 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 30 JUNI 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2022		% thd Angg	30 Juni 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.047.500.000	2.153.456.637	205,58	1.766.990.891
JUMLAH PENDAPATAN		1.047.500.000	2.153.456.637	205,58	1.766.990.891
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	33.122.266.000	15.906.062.631	48,02	18.219.610.659
Belanja Barang	B.4	228.065.299.000	66.433.609.221	29,13	52.744.454.395
Belanja Modal	B.5	22.994.575.000	5.860.725.194	25,49	21.938.227.204
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		284.182.140.000	88.200.397.046	31,04	92.902.292.258

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2022	31 Desember 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	934,794,017	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	1,798,866,654	-
Piutang PNPB	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	1,034,418,773	1,034,418,773
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	(1,387,710)	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.10	152,181	434,783,170
Persediaan	C.11	527,444,382	-
Persediaan yang Belum Diregister	C.12	-	-
Jumlah Aset Lancar		4,294,288,297	1,469,201,943
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan	C.13	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	1,089,000,068,000	1,089,000,068,000
Peralatan dan Mesin	C.15	105,624,980,694	92,877,000,717
Gedung dan Bangunan	C.16	324,256,099,222	335,299,814,950
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	12,359,677,154	9,395,644,993
Aset Tetap Lainnya	C.18	2,972,643,997	2,972,643,997
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	7,244,043,489	6,958,045,430
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(108,231,686,992)	(96,521,081,709)
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.21	-	-
Jumlah Aset Tetap		1,433,225,825,564	1,439,982,136,378
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	2,665,859,833	2,537,559,833
Aset Lain-Lain	C.22	7,521,589,928	8,310,389,928
Aset Lainnya yang Belum diregister	C.23	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	(7,690,815,218)	(8,192,449,669)
Jumlah Aset Lainnya		2,496,634,543	2,655,500,092
JUMLAH ASET		1,440,016,748,404	1,444,106,838,413
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.25	7,108,537,886	-
Utang yang Belum Ditagihkan	C.26	973,167,924	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	-	75,798,211
Uang Muka dari KPPN	C.28	934,794,017	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.29	8,256,162	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		9,024,755,989	75,798,211
JUMLAH KEWAJIBAN		9,024,755,989	75,798,211
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	1,430,991,992,415	144,031,040,202
JUMLAH EKUITAS		1,430,991,992,415	144,031,040,202
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1,440,016,748,404	144,106,838,413

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2022 DAN 30 JUNI 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2022	30 juni 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	432,573,628	1,110,628,470
JUMLAH PENDAPATAN		432,573,628	1,110,628,470
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	20,000,962,387	18,219,610,659
Beban Persediaan	D.3	1,056,817,929	675,489,830
Beban Barang dan Jasa	D.4	54,763,586,831	34,598,175,391
Beban Pemeliharaan	D.5	5,636,040,169	5,001,241,792
Beban Perjalanan Dinas	D.6	6,965,346,867	12,474,999,454
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	35,252,500	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	12,379,700,139	8,871,204,595
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		100,837,706,822	79,840,721,721
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN		(100,405,133,194)	(78,730,093,251)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	D.12		
Surplus Pelepasan Aset Nonlancar		2,200,000	79,141,388
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		2,200,000	79,141,388
Defisit Selisih Kurs		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non		1,793,245,691	627,899,258
Pendapatan dari Kegiatan Non		1,793,245,691	627,899,258
Beban dari Kegiatan Non Operasional		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON		1,795,445,691	707,040,646
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(98,609,687,503)	(78,023,052,605)
POS LUAR BIASA			
	D.13		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(98,609,687,503)	(78,023,052,605)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2022 DAN 30 JUNI 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2022	30 Juni 2021
EKUITAS AWAL	E.1	1,444,031,040,202	1,342,991,582,367
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(98,609,687,503)	(78,023,052,605)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		476,300,693	(1,179,784,565)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1		-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		(1,924,000)	(5,512,500)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.3	(474,376,693)	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.4		(1,174,547,065)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5		275,000
JUMLAH		(476,300,693)	(1,179,784,565)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	86,046,940,409	94,725,918,087
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(13,039,047,787)	15,523,080,917
EKUITAS AKHIR	E.5	1,430,991,992,415	1,358,514,663,284

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

BPSDM Hukum dan HAM merupakan ujung tombak organisasi Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal pengembangan Aparatur Hukum dan HAM, sehingga organisasi ini dituntut untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang hukum dan HAM dengan sebaik-baiknya.

Kementerian Hukum dan HAM merupakan Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kementerian Hukum dan HAM memiliki lingkup kerja yang sangat beragam, seperti bidang pemasyarakatan, bidang keimigrasian, bidang kekayaan intelektual, bidang administrasi hukum umum, pembinaan hukum nasional, peraturan perundang-undangan, penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) hak asasi manusia. Keragaman dan kompleksitas tugas ini tentunya memerlukan berbagai kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif maupun teknis yang didasari oleh Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang hukum dan HAM, dengan lebih cepat (*faster*), lebih baik (*better*), lebih murah (*cheaper*), dan terbaru (*newer*).

Permasalahan hukum dan HAM di Indonesia semakin dinamis dan kompleks. Masyarakat saat ini memiliki pemahaman dan daya kritis yang cukup tinggi di bidang hukum dan HAM. Perhatian dan tuntutan masyarakat terhadap permasalahan pelayanan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, pelayanan keimigrasian, pelayanan kekayaan intelektual,

pelayanan jasa hukum dan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) HAM serta tugas Kementerian Hukum dan HAM lainnya, sehingga bila tidak diantisipasi dan direspon dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel, akan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, pegawai Kementerian Hukum dan HAM dan pihak lain yang melaksanakan tugas di bidang hukum dan HAM, dituntut untuk senantiasa mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya dalam pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kondisi di atas menjadi tantangan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk mewujudkan seluruh SDM Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis substantif, teknis fungsional dan pelatihan hak asasi manusia.

Selain menyelenggarakan kegiatan diklat, BPSDM Hukum dan HAM juga melaksanakan *assessment center* untuk mendapatkan informasi dan pemetaan kompetensi (*soft competency*) yang dimiliki pegawai Kementerian Hukum dan HAM, dan yang dapat digunakan sebagai informasi yang memadai bagi pimpinan untuk keperluan promosi, rotasi, mutasi, pengembangan SDM untuk pembinaan karir pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugasnya juga bertanggung jawab meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia bukan saja bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM yang berada di instansi lain antara lain perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, aparat penegak hukum lainnya untuk Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sebagai konsekuensi transformasi organisasi, ke depannya BPSDM Hukum dan HAM harus mampu mengantisipasi tantangan tugas pengembangan SDM Hukum dan HAM yang semakin kompleks dalam menghadapi dinamika persoalan hukum dan HAM masyarakat Indonesia dan internasional. Melalui transformasi organisasi ini, diharapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dapat lebih implementatif, adaptif (*relevan*), mudah diakses, dan berdampak tinggi.

Tujuan :

“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”

Sasaran :

- Seluruh aparaturnya Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.
- Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi berkesinambungan.

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I TA 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Semester I TA 2022 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Entitas akuntansi di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM berjumlah 6 (enam) entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode Es I	Entitas	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM	1	-	-	-	1
2	12	Politeknik Imigrasi	1	-	-	-	1
3	12	Politeknik Ilmu Pemasarakatan	1	-	-	-	1

4	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau	-	1	-	-	1
5	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	-	1	-	-	1
6	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	-	1	-	-	1
Jumlah			3	3	-	-	6

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Lain-lain
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat

ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah

sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

- **Aset Lainnya**
 - Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
 - Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
 - Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
 - Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi
 - Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

- **Kewajiban**

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal

pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

- **Ekuitas**

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode Semester I TA 2022, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi yang dilakukan berupa revisi dengan kewenangan Ditjen. Anggaran, Kanwil Perbendaharaan, dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran serta merubah jumlah PAGU Anggaran DIPA awal. Perincian Anggaran awal dan setelah revisi berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	
	Anggaran	Anggaran
	Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	1,081,139,000	1,047,500,000
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	1,081,139,000	1,047,500,000
Belanja		
Belanja Pegawai	32,635,071,000	33,122,266,000
Belanja Barang	246,068,069,000	228,065,299,000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	5,479,000,000	22,994,575,000
Jumlah Belanja	284,182,140,000	284,182,140,000

B.1 PENDAPATAN

*Realisasi
Pendapatan
Rp2.153.456.637,00*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp2.153.456.637,00 atau mencapai 206% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.766.990.891,00. Pendapatan lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain.

Realisasi Pendapatan 31 Desember TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 21,87% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada 30 Juni TA 2022. Hal ini disebabkan karena pembayaran denda atas temuan BPK dan pengembalian belanja atas temuan Inspektorat Jenderal.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	5,779,286	136,739,476	(95.77)
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi		987,500,000	(100.00)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	-		-
Pendapatan Jasa	-		
Pendapatan Denda	353,043,950	14,482,017	2,337.81
Pendapatan Lain-lain	1,794,633,401	628,269,396	185.65
Jumlah	2,153,456,637	1,766,990,889	21.87

Laporan Realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha (4251) sebesar Rp5.779.286,00 berupa :
 - Terdapat realisasi pada Akun [425129] Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp2.200.000,00 yaitu berupa penjualan bongkaran gedung milik BPSDM Hukum dan HAM.
 - Realisasi Akun [425131] Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.579.286,00 terdiri dari satker BPSDM atas sewa ruang kantin.

2. Pendapatan Denda (4258) sebesar Rp353.043.950,00 berupa :
 - Realisasi akun (425811) Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp353.043.950,00 atas pendapatan denda atas jaminan pelaksanaan pembangunan Gedung pada Satker Badiklat Sulut

3. Pendapatan Lain-Lain (4259) sebesar Rp1.794.633.401,00 berupa :
- Adanya Realisasi Akun [425911] Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp106.866.695,00 tanpa Estimasi Anggaran dikarenakan pengembalian belanja pegawai berupa pengembalian tunjangan, pembulatan tunjangan, tunjangan Jabatan Fungsional Umum dan tunjangan Struktural, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp4.161.831,00 berupa Pengembalian kelebihan pembayaran gaji bulan September 2020 a.n NurAfdin, S.Hum Pegawai BPSDM Hukum dan HAM.
 - b. Satker Poltekim sebesar Rp102.704.830,00 berupa pengembalian atas temuan pemeriksaan Inspektorat jenderal terhadap pembayaran tunjangan kinerja an. Sohirin dikarenakan statusnya sedang melaksanakan tugas belajar.
 - c. Satker Poltekip sebesar Rp31,00 atas pembulatan gaji
 - d. Satker Badiklat Jateng sebesar Rp1.387.710,00 atas uang muka yang SP2D nya terbit bulan 2 SPM terbit bulan 3
 - e. Satker Badiklat Sulut sebesar Rp234,00 atas pembulatan gaji
 - Adanya Realisasi Akun [425913] Pendapatan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp1.686.378.996,00 pada satker BPSDM Hukum dan HAM berupa :
 - a. BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp518.437.472,00 berupa
 - Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Infrastruktur Parkir Landscape dan Drop Off

Gd Kelas POLTEKIM oleh PT. Jumba Jao Jaya Rp12.879.763,00.

- Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pengadaan Akses Internet pada BPSDM Hukum dan HAM Rp51.372.727,00 (a. Rp 9.036.363,23 pekerjaan di BPSDM Hukum dan HAM, b. Rp .42.336.363,64 pekerjaan di POLITEKNIK Tangerang)
 - Setoran Temuan BPK Rp454.184.982,00 (1. Kekurangan Vol Pekerjaan Gdg Auditorium Rp348.927.215,62 , No.2. Gdg Olahraga Rp 105.257.766,09)
- b. Satker Badiklat Sulut sebesar Rp1.167.941.524,00 berupa :
- Klaim jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran KDP Rp1.133.731.524,00
 - Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas komponen biaya langsung nonkomponen Rp27.800.000,00

B.2. BELANJA

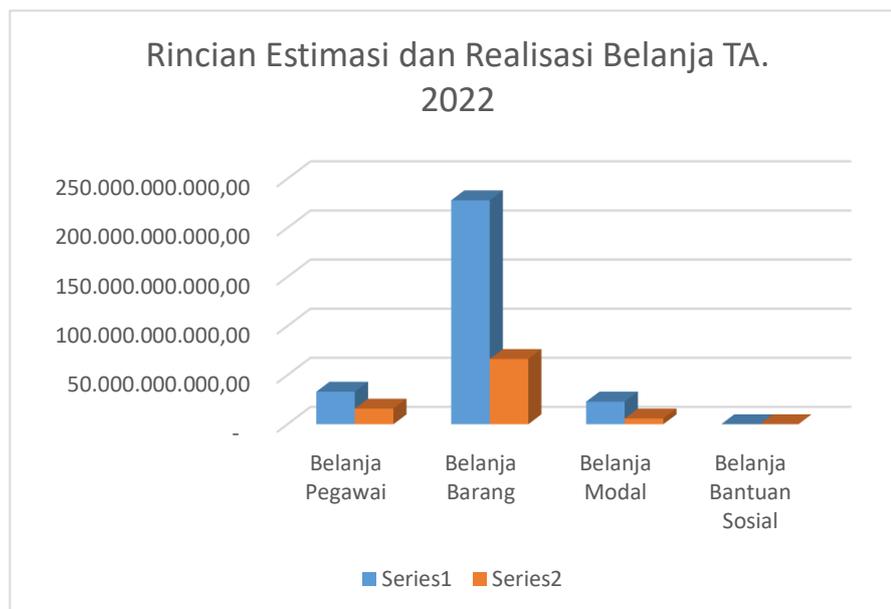
Realisasi Belanja
Rp88.200.397.046,00

Realisasi Belanja pada 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp88.200.397.046,00 atau 98,9% dari anggaran belanja sebesar Rp281.179.671.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 30 Juni TA 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 30 Juni TA 2022

Uraian	TA 2022		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	33,122,266,000	15,906,065,065	48.02
Belanja Barang	228,065,299,000	66,434,374,221	29.13
Belanja Modal	22,994,575,000	5,860,725,194	25.49
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	284,182,140,000	88,201,164,480	31.04
Pengembalian Belanja		(767,434)	-
Total Belanja	284,182,140,000	88,200,397,046	31.04

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan 31 Desember TA 2020, Realisasi Belanja pada 31 Desember TA 2021 mengalami penurunan sebesar 5.06%. Hal ini disebabkan penambahan anggaran belanja yang semula untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan metode klasikal namun dalam pelaksanaannya masih melakukan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) sehingga tidak terserap secara maksimal anggaran belanjanya. Serta adanya pemblokiran anggaran belanja yang masih di tahan dari Kementerian Keuangan.

Perbandingan Realisasi Belanja

30 Juni TA 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	15,906,062,631	18,219,610,659	(12.70)
Belanja Barang	66,433,609,221	52,744,454,395	25.95
Belanja Modal	5,860,725,194	21,938,227,204	(73.29)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	88,200,397,046	92,902,292,258	(5.06)

Belanja Pegawai
Rp15.906.062.631,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp15.906.062.631,00 dan Rp18.219.610.659,00 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai 30 Juni TA 2022 mengalami penurunan sebesar 12,79% dari 30 Juni TA 2021 Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya pegawai yang mutasi keluar ataupun masuk BPSDM Hukum dan HAM, pegawai yang menerima kenaikan pangkat dan pegawai yang perpindahan dari JFU menjadi JFT serta optimalisasi kinerja pegawai pada jam kerja sehingga berkurangnya penyerapan anggaran lembur.

Perbandingan Belanja Pegawai 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	15,609,781,065	17,807,605,388	(12.34)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS		-	-
Belanja Honorarium		-	-
Belanja Lembur	296,284,000	412,191,000	-
Jumlah Belanja Kotor	15,906,065,065	18,219,796,388	(12.70)
Pengembalian Belanja Pegawai	(2,434)	(185,729)	(98.69)
Jumlah Belanja	15,906,062,631	18,219,610,659	(12.70)

*Realisasi Anggaran Belanja Pegawai
per 30 Juni 2022*

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalia	Realisasi Neto	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	19,838,539,000	10,925,235,436		10,925,235,436	99.42
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	397,000	171,877	2,434	169,443	91.49
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,570,979,000	687,500,564		687,500,564	98.99
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	351,449,000	181,944,904		181,944,904	97.67
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,015,150,000	454,545,000		454,545,000	99.56
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,671,195,000	904,406,000		904,406,000	99.55
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	145,881,000	59,567,824		59,567,824	94.71
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,184,294,000	562,196,460		562,196,460	99.45
511129	Belanja Uang Makan PNS	4,951,941,000	1,536,733,000		1,536,733,000	98.43
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	787,107,000	297,480,000		297,480,000	97.02
512211	Belanja Uang Lembur	1,605,334,000	296,284,000		296,284,000	99.88
		33,122,266,000	15,906,065,065	2,434	15,906,062,631	99.27

Pada Tabel di atas terdapat pengembalian belanja pegawai dengan sebesar Rp2.434,00 yang disebabkan di antaranya Pengembalian belanja atas biaya pembulatan gaji .

Pada laporan realisasi anggaran yang berakhir per 30 Juni TA 2022 terdapat pengembalian belanja dengan rincian:

- BPSDM sebesar Rp2.223,00
- Badiklat Kepri sebesar Rp211,00

B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp66.433.609.221,00*

Realisasi Belanja Barang 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp66.433.609.221,00 dan Rp52.744.454.395,00.

Realisasi Belanja Barang 30 Juni TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 25,95% dari 30 Juni TA 2021. Hal ini

disebabkan meningkatnya belanja barang non operasional dan belanja jasa dikarenakan pandemi covid-19 dan pelaksanaan diklat yang dilakukan dengan metode jarak jauh sepanjang tahun 2022 .

*Perbandingan Belanja Barang
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	8,606,292,315	6,566,519,473	31.06
Belanja Barang Non Operasional	26,439,167,254	15,419,677,729	71.46
Belanja Persediaan	631,053,123	677,459,628	(6.85)
Belanja Jasa	18,520,210,548	12,632,248,189	46.61
Belanja Pemeliharaan	5,482,081,325	4,997,739,422	9.69
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6,755,569,656	12,496,929,454	(45.94)
Belanja Perjalanan Luar Negeri		-	-
Jumlah Belanja Kotor	66,434,374,221	52,790,573,895	25.85
Pengembalian Belanja	(765,000)	(46,119,500)	
Jumlah Belanja	66,433,609,221	52,744,454,395	25.95

**Realisasi Anggaran Belanja Barang
per 30 Juni 2022**

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
5211	Belanja Barang Operasional	19,611,442,000	8,606,292,315		8,606,292,315	43.88
5212	Belanja Barang Non Operasional	74,102,144,000	26,439,167,254		26,439,167,254	35.68
5218	Belanja Barang Persediaan	2,367,093,000	631,053,123		631,053,123	26.66
5221	Belanja Jasa	52,321,350,000	18,520,210,548	765,000	18,519,445,548	35.40
5231	Belanja Pemeliharaan	16,597,214,000	5,482,081,325		5,482,081,325	33.03
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	63,066,056,000	6,755,569,656		6,755,569,656	10.71
		228,065,299,000	66,434,374,221	765,000	66,433,609,221	29

Pada laporan realisasi belanja barang terdapat pengembalian yang terdiri dari :

- Pengembalian belanja akun 5221 Belanja Jasa sebesar Rp765.000,00 pada Satker BPSDM merupakan pengembalian Honor Pengajar kunjungan lapangan pada pelatihan SPPA Angkatan 1 TA.2022.

Dalam hal penanganan pandemi COVID-19 BPSDM Hukum dan HAM mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp15.591.578.000,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 terserap sebesar Rp5.593.037.691,00 atau sebesar 35,87% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Realisasi Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19
per 30 Juni 2022*

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	2,601,936,000	1,428,166,450		1,428,166,450	54.89
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	8,318,481,000	1,978,938,241		1,978,938,241	23.79
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	762,830,000	273,615,800		273,615,800	35.87
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3,908,331,000	1,912,317,200		1,912,317,200	48.93
		15,591,578,000	5,593,037,691	0	5,593,037,691	35.87

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp5.860.725.194,00

Realisasi Belanja Modal 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.860.725.194,00 dan Rp21.938.227.204,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2022 mengalami penurunan sebesar 73,29% dibandingkan 30 Juni TA 2021 hal ini dikarenakan adanya, pengurangan pengadaan peralatan dan mesin dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, pengadaan inventaris kantor serta pembelian Aplikasi yang ada di masing-masing satker BPSDM Hukum dan HAM serta telah selesainya pembangunan Gedung Politeknik di Tangerang.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah		-	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,202,989,410	1,042,385,714	399.14
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	529,435,784	20,897,116,490	(97.47)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	
Belanja Modal Lainnya	128,300,000		0.00
Jumlah Belanja Kotor	5,860,725,194	21,939,502,204	-73.29
Pengembalian		-1275000	-
Jumlah Belanja	5,860,725,194	21,938,227,204	-73.29

Rincian Realisasi Belanja Barang Modal

per 30 Juni 2022

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
5311	Belanja Modal Tanah					-
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,271,065,000	5,202,989,410		5,202,989,410	42.40
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9,704,227,000	529,435,784		529,435,784	5.46
5361	Belanja Modal Lainnya	1,019,283,000	128,300,000		128,300,000	12.59
		22,994,575,000	5,860,725,194	0	5,860,725,194	25

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah

30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	-	-	-
Belanja Modal Pembebasan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp5.202.989.410,00 mengalami kenaikan sebesar (399,14%) bila dibandingkan dengan 30 Juni TA 2021 sebesar Rp1.042.385.714,00. Hal ini disebabkan adanya penambahan atas pembelian belanja modal peralatan dan mesin dan peremajaan peralatan dan mesin yang sudah rusak untuk menunjang kinerja pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,202,989,410	1,029,985,714	405.15
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin		-	
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin		-	-
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin		-	-
Belanja Modal BLU		-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi		12,400,000	100.00
Jumlah Belanja Kotor	5,202,989,410	1,042,385,714	399.14
Pengembalian		-	-
Jumlah Belanja	5,202,989,410	1,042,385,714	399.14

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp529.435.784,00 dan Rp20.886.001.490,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah		0	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	207,822,784	20,777,861,146	100.00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	321,613,000	119,255,344	0.00
Jumlah Belanja Kotor	529,435,784	20,897,116,490	-97.47
Pengembalian Belanja Modal			-
Jumlah Belanja	529,435,784	20,897,116,490	-97.47

Realisasi Belanja Modal 30 Juni TA 2022 mengalami penurunan sebesar 97,47% dikarenakan telah selesainya pembangunan dan renovasi Gedung dan Bangunan dari satker BPSDM Hukum dan HAM atas pembangunan Gedung Olahraga dan Auditorium Politeknik. Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan dari pembangunan gedung olahraga dan gedung genset pada satker BPSDM.

*Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 30 Juni 2022*

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9,368,427,000	207,822,784		207,822,784	2.22
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung Belanja					-
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	335,800,000	321,613,000		321,613,000	95.78
		9,704,227,000	529,435,784	0	529,435,784	5

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	-	-	100.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp128.300.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal lainnya pada 30 Juni TA 2022 mengalami kenaikan dibandingkan 30 Juni TA 2021. Hal ini disebabkan oleh pengadaan software untuk program dan pelatihan yang ada di satuan kerja lingkup Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja <i>Software</i>	128,300,000	-	
Belanja Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	-	-	
Belanja Modal BLU	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	128,300,000	-	
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	128,300,000	-	#DIV/0!

Belanja Modal Lainnya merupakan pengeluaran yang diperlukan dalam Kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan lain-lain yaitu :

- Satker BPSDM sebesar Rp99.000.000,00 berupa belanja Pembelian modul penilaian kompetensi pada aplikasi Rumah Belajar
- Satker Badiklat Sulut sebesar Rp29.300.000,00 berupa belanja software aplikasi Sitarsius untuk penyelenggaraan diklat.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp.0,-

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	0	0	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp934.794.017,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp934.794.017,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Rekening Bank	637,800,000	-
Kas dibendahara Pengeluaran (TUP)	296,994,017	-
Jumlah	934,794,017	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp1.798.866.654,
00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 masing-masing sebesar Rp1.798.866.654,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada

bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kasa dalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1,798,866,654	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	1,798,866,654	-

Pada bendahara pengeluaran terdapat Kas lainnya di Bendahara pengeluaran (111821) merupakan pembayaran menggunakan LS bendahara yang pencatatan SPP nya dibulan Juni namun SP2D nya terbit di bulan Juli terdiri dari :

1. Satker BPSDM sebesar Rp733.082.692,00
2. Satker Poltekim sebesar Rp660.523.962,00
3. Satker Poltekip sebesar Rp350.000.000,00
4. Badiklat Jateng sebesar Rp54.660.000,00
5. Badiklat Sulut sebesar Rp600.000,00

C.4 Piutang PNBP

Piutang PNBP
Rp152.181,00

Saldo Piutang PNBP per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp152.181,00 dan Rp109.450.000,00 Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Piutang PNBP
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

Uraian	TH 2022	TH 2021
Piutang PNBP	-	55,000,000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	(275,000)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETT)	152,181	54,725,000
Jumlah	152,181	109,450,000

Piutang Bukan Pajak (Netto) atau Piutang lainnya (115212) merupakan potongan dari gaji yang SP2D nya di bulan Juni namun SP2d nya terbit pada bulan Juli terdiri dari :

1. Satker BPSDM sebesar Rp65.300,00
2. Satker Poltekim sebesar Rp86.881,00

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. dan Rp0,00.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR

30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

No	Nama	TH 2022	TH 2021
1	Bagian Lancar TP	-	-
2	Bagian Lancar TGR	-	-
Jumlah		-	-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

*Bagian Lancar TPA
Rp0,00*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih-
Piutang Lancar
Rp0,00*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang

ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar
30 Juni 2022*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak Lancar	-	0,00%	-
Jumlah	-		-

C.8 Beban Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka
Rp0,00

Saldo Beban Dibayar di Muka 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

JENIS	TH 2022	TH 2021
Pembayaran Internet		
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin		
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan		
Jumlah	-	-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0,00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

JENIS	TH 2022	TH 2021
Pendapatan Jasa Pelatihan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan		
Jumlah	-	-

C.10 Persediaan

Persediaan
Rp527.444.382,00

Nilai Persediaan 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp527.444.382,00 dan Rp736.417.740,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Persediaan
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

JENIS	TH 2022	TH 2021
Barang Konsumsi	455,805,247	567,752,386
Barang untuk Pemeliharaan	67,288,685	168,665,354
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	4,250,000	-
Persediaan Lainnya	100,450	-
Jumlah	527,444,382	736,417,740

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Dokumentasi dan BA Pemeriksaan Barang (stok opname persediaan) terlampir.

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0,00

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR) per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan

Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.14 Tanah

Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.089.000.068.000,00 dan Rp1.089.000.068.000,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

- Luas Tanah BPSDM Hukum dan HAM secara keseluruhan 103.770 m² terletak di Jl. Raya Gandul No.4 Cinere, Depok.
- Tanah seluas 2.559 m² terletak di Jl. Percetakan Negara VII No.27, Rawasari, Jakarta Pusat.
- Asset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara Tanah seluas 3.000m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara terletak di Jl. Manembo-nembo Kel. Sagerat Weru Dua Kec. Matuari Kota Bitung Sulawesi Utara.
- Asset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa

Tengah Tanah seluas 51.604m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terletak di Jl. Muhammad Ikhshan, Semarang Jawa Tengah.

- Penambahan Asset tanah lainnya pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepulauan Riau seluas 40.000m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terletak di Telaga Punggur – Pantai Timur Kabil Batam dimana status kepemilikan dalam proses sertifikasi Balik Nama di BPN.

C.15 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin*
Rp105.624.980.694,00

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp105.624.980.694,00 dan Rp77.320.563.531,00 Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	Rp 92,877,000,717
Mutasi tambah:	Rp 13,604,285,977
Pembelian	Rp 5,139,178,910
Saldo awal	Rp 8,407,896,567
Transfer Masuk	Rp -
Pengembangan Nilai Aset	Rp 57,210,500
Mutasi kurang:	Rp 856,306,000
Transfer keluar	Rp -
Reklasifikasi Aset	Rp -
Transaksi Normalisasi BMN	Rp -
Saldo per 30 Juni 2022	Rp 105,624,980,694
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2022	Rp (64,959,818,730)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	Rp 40,665,161,964

Mutasi bertambah mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai berasal

dari:

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp12.214.522.567,00
- Satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp17.000.000,00
- Satker Badiklat Kepulauan Riau senilai Rp605.860.000,00
- Satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp256.326.900,00
- Satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp510.574.510

Mutasi kurang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai berasal dari:

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp685.746.000,00
- Badiklat Kepri sebesar Rp170.560.000,00

C.16 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp324.256.099.222,00

Saldo gedung dan bangunan per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah Rp324.256.099.222,00 dan Rp335.299.814.950,00.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	335,299,814,950
Mutasi tambah:	30,439,579,823
Transfer Masuk	
Saldo Awal	30,117,966,823
Perolehan Hasil tindak Lanjut Normalisasi	
Pengembangan Nilai Aset	321,613,000
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	
Mutasi kurang:	41,483,295,551
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	41,483,295,551
Transaksi Normalisasi BMN	
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya	
Saldo per 30 Juni 2022	324,256,099,222
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2022	(36,234,783,837)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	288,021,315,385

Terdapat Nilai Mutasi Tambah sebesar Rpberupa :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp30.117.966.823,00 atas penyelesaian pembangunan Gedung Olahraga tertutup permanen dan satu unit bangunan rumah genset. Dan pengembangan nilai asset sebesar Rp124.733.000,00
- Satker Badiklat Jateng sebesar Rp196.880.000,00 atas pengembangan aset

Terdapat Nilai Mutasi Kurang senilai Rp41.483.295.551 berupa:

- Koreksi pencatatan nilai/kuantitas dari satker BPSDM sebesar Rp41.483.295.551,00 atas bangunan gedung pertemuan permanen di Politeknik Tangerang

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp12.359.677.154,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp12.359.677.154,00 dan Rp9.395.644.993,00.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	9,395,644,993
Mutasi tambah:	2,964,032,161
Pembelian	-
Koreksi pencatatan nilai	2,964,032,161
Mutasi kurang:	-
Revaluasi Aset	-
Saldo per 30 Juni 2022	12,359,677,154
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2022	(5,409,584,425)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	6,950,092,729

Mutasi tambah dari satker BPSDM sebesar Rp2.964.032.161,00 berupa renovasi jalan khusus kompleks yang berada di Tangerang yang menambah nilai jalan.

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya
Rp2.972.643.997,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 adalah Rp2.972.643.997,00 dan Rp2.972.643.997,00.

Saldo per 31 Desember 2021	2,972,643,997
Mutasi tambah:	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Penyelesaian Pembangunan	-
Saldo per 30 Juni 2022	2,972,643,997
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Juni 2022	(1,537,500,000)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	1,435,143,997

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/ kebudayaan, sebesar Rp2.972.643.997,00 berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp1.351.026.622,00 berupa monografi 4.777 buah Rp717.668.957,00, Referensi 2 buah Rp108.869.635,00, buku lainnya 794 buah Rp452.788.030,00, naskah/manuskrip berbahan kertas 1 buah Rp48.220.000,00, alat musik modern/band 1 buah Rp19.480.000,00 dan pahatan logam 1 buah Rp.5.000.000,00.
- Satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp.867.743.575,- berupa monografi sebanyak 1.653 buah Rp51.093.575,00 dan alat musik modern/band sebanyak 108 buah Rp816.650.000,00.
- Satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp.753.873.800,- berupa monografi sebanyak 1480 buah Rp51.503.800,00 dan alat musik modern/band 226 6 buah Rp702.370.000,00.

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp7.244.043.489,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.244.043.489,00 dan Rp0,00 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Konstruksi dalam pengerjaan terdapat pada Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp285.998.059,00 dan konstruksi dalam pekerjaan pada Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp6.958.045.430,00

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(Rp108.041.781.543,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing (Rp108.041.781.543,00) dan (Rp96.521.081.709,00.) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni TA 2022, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	105,624,980,694	64,959,818,730	40,665,161,964
2	Gedung dan Bangunan	324,256,099,222	36,324,783,837	287,931,315,385
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12,359,677,154	5,409,584,425	6,950,092,729
4	Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997	1,537,500,000	1,435,143,997
	Total	445,213,401,067	108,231,686,992	336,981,714,075

C.21 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp2.665.859.833,00

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.665.859.833,00 dan Rp2.537.559.833,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan terdapat pada lampiran.

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni TA 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud
30 Juni 2022*

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 2,636,559,833
2	ATB Lainnya	Rp -
Jumlah Nilai Perolehan per 30 Juni 2022		Rp 2,636,559,833

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp 2,537,559,833
Mutasi tambah:	Rp 128,300,000
Pembelian	Rp 128,300,000
Transfer Masuk	Rp -
Reklasifikasi Masuk	Rp -
Pengembangan Nilai Aset	Rp -
Saldo per 30 Juni 2022	Rp 2,665,859,833
Akumulasi Amortisasi s.d 30 Juni 2022	Rp 1,548,921,683
Nilai Buku per 30 Juni 2022	Rp 1,116,938,150

Penggunaan Aset tak Berwujud berupa *software* sebesar Rp2.636.559.833,00 yang dicatat sebagai asset dengan sumber daya jangka panjang yang biasanya tidak memiliki keberadaan fisik namun memiliki nilai atau jumlah manfaat di masa depan yang tidak diketahui (tidak terbatas) terdapat pada :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp1.090.352.500,00 terdiri dari :
 - a. barcode : digunakan untuk memberi tanda pada BMN yang berada di lingkungan BPSDM dan CBHRIS : aplikasi kediklatan sebesar Rp81.875.000,00.

- b. Modul aplikasi *Self Assesment* Rumah Belajar ASN Rp88.350.000,00.
- c. Modul aplikasi *Self Service* Rumah Belajar ASN Rp83.900.000,00.
- d. Manajemen diklat Rumah Belajar ASN Rp88.800.000,00.
- e. Modul Aplikasi *Learning Journey* Rp90.090.000,00.
- f. Modul *Digital Library* Rp87.780.000,00.
- g. Aplikasi *E-learning* Rp90.502.000,00.
- h. Modul Sertifikasi dan pelatihan Rp93.857.000,00.
- i. Modul *Community of Practive* Rp88.660.000,00.
- j. modul aplikasi rumah belajar ASN Rp82.445.000,00.
- k. Aplikasi peserta Diklat di Pusat Penilaian Kompetensi sebesar Rp50.593.500,00.
- l. Aplikasi uji kompetensi Rp96.500.000,00.
- m. Aplikasi *e-book e-library* Rp67.000.000,00.
- n. Modul Penilaian Kompetensi pada Aplikasi Rumah Belajar Rp99.000.000,00
- Satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp652.865.033,00 berupa *software* komputer pada laboratorium keimigrasian.
- Satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp634.300.000,00 terdiri dari :
Software sebesar Rp634.300.000,00 berupa :
 - 1. Aplikasi SIMENTOR Rp242.000.000,00
 - 2. Aplikasi *e-library* Rp144.000.000,00
 - 3. Pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Taruna dan Orang Tua untuk pembuatan Sistem Informasi Akademik (SIKMA) Rp248.300.000,00
- Satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp69.042.300,00 dengan rincian Rp29.042.300,00 berupa Aplikasi COP untuk Pelatihan diklat, Rp.20.0000.000,00 berupa *software* aplikasi SIKMA (Sistem Informasi Keuangan Mandiri) dan Rp20.000.000,00 berupa *software* aplikasi Sistem Informasi Honorium.

- Satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp91.000.000,00 dengan rincian Rp31.500.000,00 berupa aplikasi Badiklat *Learning Center* dan Rp29.500.000,00 berupa aplikasi Sistem Informasi Pelatihan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah (SILABA) dan Rp30.000.000,00 berupa aplikasi pengembangan aplikasi Badiklat *Learning Center*.
- Satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp29.300.000,00 berupa Aplikasi sitarsius untuk penyelenggara diklat.

Adapun Mutasi Tambah pada aset tak berwujud sebesar Rp128.300.000,00 antara lain:

- Pembelian sebesar Rp128.300.000,00 terdiri dari
 - a. Satker BPSDM sebesar Rp99.000.000,00 berupa Modul Penilaian Kompetensi pada Aplikasi Rumah Belajar
 - b. Satker Poltekip sebesar Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp29.300.000,00 berupa Aplikasi sitarsius untuk penyelenggara diklat.

C.22 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp7.521.589.928,00

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah Rp7.521.589.928,00 dan Rp8.310.389.928,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSDM Hukum dan HAM serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Lain-Lain Berdasarkan Jenis Aset
Per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Jenis Aset	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	Rp 7,521,589,928	Rp 8,310,389,928
Total	Rp 7,521,589,928	Rp 8,310,389,928

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp 8,310,389,928
Mutasi tambah:	
Penghentian Aset dr penggunaan	
Mutasi kurang:	
Penghapusan BMN	Rp 788,800,000
Saldo per 30 Juni 2022	Rp 7,521,589,928
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2022	Rp 6,143,318,545
Nilai Buku per 30 Juni 2022	Rp 1,378,271,383

Mutasi kurang Aset Lain-lain terdiri dari:

- Poltekim sebesar Rp788.880.000,00 berupa penghapusan 3 unit micro bus (Penumpang 15 s/d 29 orang) dan 1 unit Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp7.690.815.218,00*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.690.815.218,00 dan Rp8.192.449.669,00 Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	2,636,559,833	1,548,921,683	1,087,638,150
2	ATB Lainnya	0		-
	Jumlah	2,636,559,833	1,548,921,683	1,087,638,150
B	Aset Lainnya	7,521,589,928	6,141,893,535	1,379,696,393
	Jumlah	7,521,589,928	6,141,893,535	1,379,696,393
	Total	10,158,149,761	7,690,815,218	2,467,334,543

C. 24 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN
Rp934.794.017,00*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 masing-masing sebesar Rp934.794.017,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp7.108.537.886,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 masing-masing sebesar Rp7.108.537.886,00 dan Rp0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari belanja pegawai yang masih harus dibayar berupa uang makan bulan November dan Desember 2019 pada Balai Diklat Sulawesi Utara dan segera akan ditindaklanjuti.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp -
2	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	Rp -
3	Potongan Pajak yang belum disetor	Rp -
4	Utang kepada Pihak Lainnya	Rp -
Total		Rp -

Adapun rincian dari utang kepada pihak ketiga antara lain

1. Satker BPSDM sebesar Rp3.968.555.680,00
 - Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111) sebesar Rp 2.409.281.554,00 merupakan pembayaran Gaji Induk Bulan Juli serta Gaji ke-13 Pegawai yang SPPnya terbit pada bulan Juni dan SP2D nyaterbit bulan Juli
 - Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212112) sebesar Rp826.191.434,00 merupakan pembayaran Honor PPNPN bulan Juli yang SPPnya terbit pada bulan Juni dan SP2Dnya terbit bulan Juli
 - Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) sebesar Rp 733.082.692,00 merupakan pembayaran LS bendahara yang SPPnya terbit pada bulan Juni dan SP2D nyaterbit bulan Juli

2. Satker Poltekim sebesar Rp1.390.517.154,00
 - Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111) sebesar Rp695.549.354,00 merupakan pembayaran Gaji Induk Bulan Juli serta Gaji ke-13 Pegawai yang SPPnya terbit pada bulan Juni dan SP2D nyaterbit bulan Juli
 - Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212112) sebesar Rp 42.700.000,00 merupakan pembayaran Honor PPNPN bulan Juli yang SPPnya terbit pada bulan Juni dan SP2Dnya terbit bulan Juli
 - Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) sebesar Rp652.267.800,00 merupakan LS bendahara berupa uang saku taruna yang belum di Payroll

3. Satker Poltekip sebesar Rp1.127.528.734,00
 - Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111) sebesar Rp589.239.805,00 merupakan pembayaran Gaji Induk Bulan Juli serta Gaji ke-13 Pegawai yang SPPnya terbit pada bulan Juni dan SP2Dnya terbit bulan Juli
 - Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212112) sebesar Rp188.288.929,00 merupakan pembayaran belanja penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang yang SP2d nya terbit di bulan Juli

4. Satker Badiklat Jateng sebesar Rp286.945.449,00
 - Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111) sebesar Rp154.638.174,00 merupakan belanja pegawai yang masih harus dibayar yang SPPnya terbit bulan Juni dan SP2Dnya dibulan Juli (Gaji ke-13 Rp69.732.508,00 gaji induk Juli
 - Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212112) sebesar Rp77.647.275,00 merupakan Pembayaran termin II jasa konsultasi perencanaan pembangunan.

- Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) sebesar Rp54.660.000,00 merupakan LS Bendahara Honor Pengajar Latsar
5. Satker Badiklat Kepri sebesar Rp161.129.489,00
- Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111) sebesar Rp143.129.489,00 merupakan pembayaran Gaji Induk Bulan Juli serta Gaji ke-13 Pegawai yang SPPnya terbit pada bulan Juni dan SP2D nyaterbit bulan Juli
 - Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212112) sebesar Rp18.000.000,00 merupakan Pembayaran Honorarium Tenaga Pengajar Pelatihan Dasar yang SPPnya terbit pada bulan Juni dan SP2D nyaterbit bulan Juli
6. Satker Badiklat Sulut sebesar Rp173.861.280,00
- Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111) sebesar Rp103.061.380,00 merupakan pembayaran Gaji Induk Bulan Juli serta Gaji ke-13 Pegawai yang SPPnya terbit pada bulan Juni dan SP2D nyaterbit bulan Juli
 - Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212112) sebesar Rp70.200.000,00 merupakan
 - Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) sebesar Rp600.000,00 merupakan

C.26 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp973.167.924,00
Rp973.167.924,00

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan 30 Juni TA 2022 sebesar Rp973.167.924,00 timbul dikarekan perjurnalan atas SPP/SPM yang diterbitkan. Pada saat itu utang definitive diakui. Jurnal SPP/SPM hanya dilakukan pada jurnal akrual, karena belum melibatkan transaksi kas maka belum dicatat pada jurnal kas. Rincian utang yang belum ditagihkan antara lain :

- Satker BPSDM sebesar Rp721.867.694,00 merupakan kuitansi UP yang belum di SPJ-kan (belum dibuat SPM GUP).

- Satker Poltekim sebesar Rp59.768.525,00 merupakan kuitansi UP yang belum di SPJ-kan (belum dibuat SPM GUP).
- Badiklat Kepri sebesar Rp30.962.700,00 merupakan pembayaran biaya perjalanan dinas yang dibayarkan pada tanggal 29 dan 30 juni 2022, namun pengajuan SPM GUPnya tanggal 01 Juli 2022
- Badiklat Jateng sebesar Rp160.569.005,00 merupakan Satker BPSDM sebesar Rp721.867.694,00 merupakan kuitansi UP yang belum di SPJ-kan (belum dibuat SPM GUP).

C.27 Utang Jangka Pendek Lainnya

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp8.256.162,00*

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya 30 Juni TA 2022 sebesar Rp8.256.162,00 merupakan pembayaran pajak yang belum disetor. Rincian utang jangka pendek yang belum ditagihkan antara lain :

- Satker Poltekim sebesar Rp8.256.162,00

C.28 Pendapatan Diterima di Muka

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0,00*

Nilai Pendapatan Diterima di Muka 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp75.798.211,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Diterima di Muka
30 Juni 2022*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
PT. Bank Mandiri Persero	Rp -	Sewa Ruang ATM
STIH LITIGASI	Rp -	sewa Gedung STIH LITIGASI ALTRI
Badan Lainnya	Rp -	
Total	Rp -	

C.29 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih harus Dibayar Rp0,00 Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

Keterangan	TH 2021	TH 2020
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar		
Jumlah	-	-

C.30 Ekuitas

Ekuitas Rp1.430.991.992.415,00 Ekuitas per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.430.991.992.415,00 dan Rp1.444.031.040.202,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBPNP
Rp432.573.628,00

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp432.573.628,00 dan Rp1.110.628.470,00 Pendapatan tersebut terdiri dari :

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA. 2022 dan 2021*

Uraian	TH 2022	TH 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	79,529,678	91,205,962	114.68
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan		987,500,000	#DIV/0!
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	353,043,950	463,000	0.13
Pendapatan Anggaran Lain-lain		44	#DIV/0!
Jumlah	432,573,628	1,079,169,006	249.48

Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak antara lain:

- Satker BPSDM sebesar Rp10.575.399,00 atas sewa flat,sewa ruang kantin dan sewa ruang mesin ATM
- Satker Poltekip sebesar Rp68.346.112,00 pendapatan atas sewa Gedung ALTRI
- Satker Poltekim sebesar Rp608.167,00
- Satker Badiklat Sulut sebesar Rp353.043.950,00 merupakan pendapatan denda

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp20.000.962.387,00

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp20.000.962.387,00 dan Rp18.219.610.659,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai

30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Beban	TH 2022	TH 2021
Beban Gaji Pokok PNS	14,060,509,456	21,806,700,840
Beban Pembulatan Gaji PNS	223,554	347,450
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(2,434)	(4,366)
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	885,537,584	1,404,245,448
Beban Tunjangan Anak PNS	233,652,662	355,178,798
Beban Tunjangan Struktural PNS	591,265,000	955,210,000
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS		(1,620,000)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	1,177,422,000	1,811,090,000
Beban Tunjangan PPh PNS	97,637,025	132,790,482
Beban Tunjangan Beras PNS	723,258,540	1,124,682,600
Pengembalian Tunj. Beras PNS		
Beban Uang Makan PNS	1,536,733,000	3,973,745,000
Pengembalian Beban Uang Makan PNS		
Beban Tunjangan Umum PNS	382,975,000	604,685,000
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS		(7,585,100)
Beban Uang Lembur	311,751,000	1,860,867,000
Jumlah	20,000,962,387	34,020,333,152

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp1.056.817.929,00

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.056.817.929,00 dan Rp675.489.830,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Persediaan

30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Beban	TH 2022	TH 2021	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	990,265,099		#DIV/0!
Beban Persediaan Bahan Baku	16,552,100	-	-
Beban Persediaan Lainnya	50,000,730	-	-
Jumlah Beban Persediaan	1,056,817,929	0	#DIV/0!

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa

Rp54.763.586.831,00

Beban Barang dan jasa pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp54.763.586.831,00 dan Rp67.626.170.915,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	TH 2022	TH 2021	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	6,932,852,567	11,875,090,917	(42)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,788,430	18,298,380	(90)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	641,490,000	1,016,880,000	(37)
Beban Barang Operasional Lainnya	496,254,444	1,396,030,578	(64)
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya		(4,725,000)	-
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,465,082,800	5,139,604,102	(71)
Beban Bahan	2,951,918,368	5,300,748,705	
Pengembalian Beban Bahan		(41,000)	(100)
Beban Honor Output Kegiatan	756,070,000	1,777,427,000	(57)
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan		(3,520,000)	(100)
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya		(35,595,000)	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	20,838,382,925	27,348,922,140	(24)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,993,425,115	4,250,759,883	-
Pengembalian Beban Barang Non Operasional - Penanganan		(14,868,455)	(7,753)
Beban Langganan Listrik	1,137,833,829	1,946,491,705	(100)
Beban Langganan Telepon	5,884,551	31,141,398	(90)
Beban Langganan Air	3,093,600	5,049,175	(38.73)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,399,639,793	3,312,304,337	33
Beban Sewa	4,013,216,219	4,659,437,180	-
Beban Jasa Profesi	7,050,129,990	25,311,777,500	-
Pengembalian Beban Jasa Profesi	(765,000)	(334,168,953)	(100)
Beban Jasa Lainnya	164,972,000	502,507,545	-
Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		(3,663,000)	
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,912,317,200	626,288,200	
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin		68,018,480	(100)
Jumlah	54,763,586,831	94,190,195,817	(42)

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp5.636.040.169,00

Beban pemeliharaan pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.636.040.169,00 dan Rp11.994.059.152. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	TH 2022	TH 2021	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,084,341,027	8,162,210,526	(50)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Covid		-	
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		(3,919,500)	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,259,984,761	2,950,401,415	(57)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	291,714,381	835,366,711	-
Jumlah	5,636,040,169	11,944,059,152	(53)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp6.965.346.867,00

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.965.346.867,00 dan Rp16.616.890.640,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Beban	TH 2021	Th 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	6,252,356,494	14,765,235,145	-57.65
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa		(406,540,633)	0.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	357,171,397	597,952,400	-40.27
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		(1,950,000)	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		208,874,000	-100.00
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19		2,700,000	
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		(16,002,200)	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	355,818,976	1,466,621,928	0.00
Jumlah	6,965,346,867	16,616,890,640	-58.08

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp35.252.500,,00*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp35.252.500,00 dan Rp0,00

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

Uraian Jenis Beban	TH 2022	TH 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan pita cukaim materai dan leges	5,252,500	-	-
Beban Barang Persediaan lainnya untuk Dijual/Diserahkan Kepada masyarakat	30,000,000	-	-
Jumlah	35,252,500	-	-

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat dikarenakan kesalahan pada proses penginputan SPM/SP2D pada modul komitmen antara lain :

- Satker BPSDM sebesar Rp5.252.500,00 atas pembelian materai
- Satker Poltekip sebesar Rp30.000.000,00 atas pembelian masker

D.8 Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial
Rp0,00*

Beban Bantuan Sosial 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban bantuan sosial untuk 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial

30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	TH 2021	TH 2020	% Naik (Turun)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp12.379.700.139,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp12.379.700.139,00 dan Rp19.931.931.876,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Beban Penyusutan Dan Amortisasi	TH 2022	TH 2021	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7,019,670,209	10,349,968,410	(32)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4,484,046,851	8,273,395,143	(46)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	573,834,976	851,266,737	(33)
Beban Penyusutan Irigasi	9,904,429	19,808,858	(50)
Beban Penyusutan Jaringan	5,078,125	10,156,250	(50)
Beban Amortisasi Software	243,972,885	371,963,686	
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	43,192,664	55,372,792	-
Jumlah	12,379,700,139	19,931,931,876	(38)

Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih
Rp0,00

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp47.425,00). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

Uraian Jenis Beban	TH 2022	TH 2021	% Naik (Turun)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	(47,425)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	-	(47,425)	-

D.11 BEBAN LAIN-LAIN

Beban Lain-lain
Rp0,00

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Rp1.795.445.691,00

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

Uraian	TH 2022	TH 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2,200,000	79,141,388	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,793,245,691	1,224,698,383	46.42
Beban dari Keg. Non Operasional Lainnya		252,857,000	-100.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)		-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)		-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1,795,445,691	1,050,982,771	70.83

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2020.*

- Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp2.200.000,0 yang merupakan pendapatan dari penjualan bongkahan bangunan pada Satker BPSDM Hukum dan HAM.
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya didapat dari:
 1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) senilai Rp106.866.695
 - a. Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp4.161.831,00 berupa Pengembalian kelebihan pembayaran gaji bulan September 2020 a.n NurAfdin, S.Hum Pegawai BPSDM Hukum dan HAM.
 - b. Satker Poltekim sebesar Rp102.704.830,00 berupa pengembalian atas temuan pemeriksaan Inspektorat jenderal terhadap pembayaran tunjangan kinerja an. Sohirin dikarenakan statusnya sedang melaksanakan tugas belajar.
 - c. Satker Poltekip sebesar Rp31,00 atas pembualatan gaji
 - d. Satker Badiklat Jateng sebesar Rp1.387.710,00 atas uang muka yang SP2D nya terbit bulan 2 SPM terbit bulan 3
 - e. Satker Badiklat Sulut sebesar Rp234,00 atas pembualatan gaji
 2. Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Modal (425913) senilai Rp1.686.378.996 terdiri dari:
 - a. BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp518.437.472,00 berupa
 - Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Infrastruktur Parkir Landscape dan Drop Off Gd

Kelas POLTEKIM oleh PT. Jumba Jao Jaya Rp12.879.763,00.

- Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pengadaan Akses Internet pada BPSDM Hukum dan HAM Rp51.372.727,00 (a. Rp 9.036.363,23 pekerjaan di BPSDM Hukum dan HAM, b. Rp .42.336.363,64 pekerjaan di POLITEKNIK Tangerang)
 - Setoran Temuan BPK Rp454.184.982,00 (1. Kekurangan Vol Pekerjaan Gdg Auditorium Rp348.927.215,62 , No.2. Gdg Olahraga Rp 105.257.766,09)
- b. Satker Badiklat Sulut sebesar Rp1.167.941.524,00 berupa :
- Klaim jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran KDP Rp1.133.731.524,00
 - Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas komponen biaya langsung nonkomponen Rp27.800.000,00
 - Pengembalian Belanja Modal Berupa Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021 Rp6.410.000,00

D.13 POS-POS LUAR BIASA

*Pos-Pos Luar Biasa
Rp0,00*

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

Uraian	TH 2021	TH 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan PNPB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Defisit Pos Luar Biasa	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp1.444.031.040.202
00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.444.031.040.202,00 dan Rp1.342.991.582.367,00.

E.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO
(Rp98.609.687.503,
00)

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah defisit sebesar (Rp98.609.687.503,00) dan (Rp78.023.052.605,00). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/Kesalah
an Mendasar
Rp0,00

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2022 sebesar Rp0,00.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai
Aset
Rp0,00

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi
Nilai
Persediaan
Rp0,00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 30 Juni TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan untuk Pemeliharaan	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

E.3.3 Koreksi Reklasifikasi Aset

*Koreksi
Reklasifikasi Aset
(Rp1.924.000,00)*

Reklasifikasi aset adalah pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya. Koreksi reklasifikasi aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp1.924.000,00) dan (Rp5.512.500,00). Dari Satker BPSDM berupa selisih nilai persediaan menjadi aset atas laser pointer 4 unit

Rincian Koreksi Reklasifikasi Aset

Per 30 Juni 2022

Jenis	Nilai Koreksi	Keterangan
Peralatan dan Mesin	Rp 1,924,000	reklas masuk atas peralatan dan mesin
Jumlah	Rp 1,924,000	-

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset

*Selisih Revaluasi
Aset Rp0,00*

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset. Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
(Rp474.376.693,00)*

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebesar (Rp474.376.693,00) dan (Rp1.174.547.065,00). Koreksi Nilai Aset Non revaluasi terdiri dari:

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Per 30 Juni 2022

KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT	PENJELASAN
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	41,483,295,551	0	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Pertemuan Permanen
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	414,832,956	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Pertemuan Permanen
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	38,500,000	Saldo Awal Mesin Pompa air PMK
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	24,375,000	Saldo Awal Televisi
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	49,360,000	Saldo Awal Mesin Pompa air PMK
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	138,035,000	Saldo Awal CCTV - Camera Control Television System
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	52,290,000	Saldo Awal Sound System
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	73,685,040	Saldo Awal LCD Monitor
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	3,764,423,400	Saldo Awal Sound System
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	49,300,000	Saldo Awal Sound System
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	1,250,327,100	Saldo Awal Bangunan Rumah Genset
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	28,867,639,723	Saldo Awal Gedung Olah Raga Tetutup Permanen
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	49,000,000	Saldo Awal Mesin Pompa air PMK
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	3,797,558,427	Saldo Awal LCD Monitor
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	28,070,000	Saldo Awal Mesin Pompa air PMK
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	161,160,000	Saldo Awal CCTV - Camera Control
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	100,160,000	Saldo Awal Pompa Lumpur
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	75,379,700	Saldo Awal Mesin Pompa air PMK
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	2,964,032,161	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Jalan Khusus Kompleks
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	889,209,649	0	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Jalan Khusus Kompleks
TOTAL		42,372,505,200	41,898,128,507	(474,376,693)

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
Rp0,00

Koreksi Lain-Lain untuk periode 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp275.000,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban,

koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Koreksi ini merupakan koreksi pendapatan atas pengembalian sewa gedung ALTRI

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp86.046.940.409,00 dan Rp252.585.972.857,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	88,200,397,046
Diterima dari Entitas Lain	(2,153,456,637)
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	
Pengesahan Hibah Langsung	
Jumlah	86,046,940,409

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni TA 2022, DDEL sebesar (Rp2.153.456.637,00) sedangkan DKEL sebesar Rp88.200.397.046,00

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni TA 2022 sebesar Rp,00 sedangkan Transfer Keluar sebesar (Rp,00) dari Balai Diklat Jawa Tengah kepada Kanwil Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah berupa peralatan. Terdapat perbedaan atau selisih antara saldo transfer keluar dengan saldo transfer masuk senilai Rp,00 pada satker BPSDM dikarekan Ditjen Kekayaan Intelektual mencatat transfer keluar menggunakan akun Aset tetap Renovasi (13511) sedangkan BPSDM mencatat transfer masuk menggunakan akun Gedung dan Bangunan (13311)

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni TA 2022 sebesar Rp0,00 terdapat pada Badiklat Kepri yang merupakan hibah sepeda motor satu buah dari Bank Negara Indonesia

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni TA 2022 adalah Rp0,00.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp1.358.514.663.284,
00.

Nilai ekuitas pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.430.991.992.415,00 dan Rp1.358.514.663.284,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Terdapat akun Beban Barang Utuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp35.252.500,00 yang disebabkan oleh kesalahan input transaksi.Satker BPSDM menggunakan akun Beban Persediaan Bahan Baku (593131) Rp5.252.500 atas pembelian materai dan Satker Poltekip menggunakan akun Beban Barang Persediaan lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (593128) Rp30.000.000,00 untuk pembelian masker
2. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) sebesar Rp1.034.418.773,00 pada satker Badiklat Sulut atas pencatatan KDP yang belum di jurnal awal tahun 2022
3. Uang Muka Belanja (prepayment) sebesar (Rp1.387.710,00) pada Badiklat Jawa Tengah atas uang muka yang SP2D nya terbit bulan 2 SPM terbit bulan 3.
4. Tindak lanjut temuan Itjen/BPK
 - a. Barang Tidak Ditemukan berupa Gedung Perpustakaan dan Zitting Plaat masih menunggu reviu Inspektorat Jenderal, dimana hasil reviu Inspektorat Jenderal tersebut digunakan sebagai salah satu dokumen dalam usulan penghapusan Barang Tidak Ditemukan.
 - b. Tanah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM sudah terkoreksi sebesar 3.420 m2 akibat pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari tetapi belum tercatat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR). Terkait penggantian tol dengan nilai appraisal sebesar Rp. 25.248.900.000,-
 - c. Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2021 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara yang belum selesai, hingga saat ini dihentikan sementara sampai revisi anggaran disetujui.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- I. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap pos-pos dalam laporan keuangan antara lain :
 - a. Penyesuaian anggaran dan Penambahan Output dalam kegiatan pada masa pandemik.
 - b. Perubahan Pelatihan teknis metode klasikal menjadi Metode *E-Learning* dan Pelatihan Jarak Jauh sebagai upaya untuk mencegah penyebaran dan menekan dampak yang ditimbulkan Covid-19.
 - c. Adanya tambahan anggaran belanja untuk pemeliharaan gedung dan bangunan khusus untuk masa pandemik.
 - d. Capaian output strategis dan penjelasan Refocusing Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) sudah dilakukan sesuai target dan penganggaran untuk pelaksanaan sesuai dengan akun yang telah dianggarkan sejak awal tahun 2022

II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19

(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN	SMT I TA 2021		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI	
52	BELANJA BARANG			
5211	Belanja Barang Operasional			
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	2,601,936,000	1,428,166,450	54.89
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,601,936,000	1,428,166,450	54.89
5212	Belanja Barang Non Operasional			
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	8,318,481,000	1,978,938,241	0.00
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	8,318,481,000	1,978,938,241	54.89
5218	Belanja Barang Persediaan			
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	762,830,000	273,615,800	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	762,830,000	273,615,800	54.89
5221	Belanja Jasa			
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3,908,331,000	1,912,317,200	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	3,908,331,000	1,912,317,200	54.89
5241	Belanja perjalanan Dalam Negeri			
524115	Belanja Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi covid-19	-	0	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	-	-	
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada			
526322	Belanja Barang Untuk bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang-penanganan Pandemi covid-19	-	-	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	-	-	0.00
53	BELANJA MODAL			
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19			
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321			#DIV/0!
	JUMLAH BELANJA	15,591,578,000	5,593,037,691	35.87

- Realisasi Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (521131) sebesar Rp1.428.166.450,00 berasal dari satker : BPSDM Rp869.838.100,00, Poltekim Rp407.188.275,00, Poltekip Rp72.116.257,00, Badiklat Jateng Rp3.680.343,00, Badiklat Sulut Rp73.342.475,00.
- Realisasi Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (521241) sebesar Rp1.978.938.241,00 berasal dari satker : BPSDM Rp440.614.376,00, Poltekim Rp714.900.000,00, Poltekip Rp703.563.065,00, Badiklat

Kepri Rp67.900.700,00, Badiklat Jateng Rp30.437.600,00, Badiklat Sulut Rp21.522.500,00.

- Realisasi Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid-19 (521841) sebesar Rp273.615.800,00 berasal dari satker : Poltekim Rp49.095.000,00, Poltekip Rp167.050.000,00, Badiklat Kepri Rp27.565.000,00, Badiklat Jateng Rp29.905.800,00
 - Realisasi Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19 (522192) sebesar Rp1.912.317.200,00 berasal dari satker : BPSDM Rp1.149.694.000,00, Poltekim Rp382.995.000,00, Poltekip Rp289.821.000,00, Badiklat Kepri Rp38.403.000,00, Badiklat Jateng Rp23.560.000, Badiklat Sulut Rp27.844.200,00.
- III. Pengajuan Perubahan Semula Menjadi terhadap pandemic Covid-19 satker BPSDM Hukum dan HAM dilampirkan pada data (terlampir).

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER JUNI 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl. Data 08/08/22 9:29 PM
Tgl. Cetak 09/08/2022 8:20 AM
lap_neraca_es1_komparatif --SAKTI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	934,794,017	0	934,794,017	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,798,866,654	0	1,798,866,654	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	1,034,418,773	1,034,418,773	0	0.00
Uang Muka Belanja (prepayment)	(1,387,710)	0	(1,387,710)	0.00
Piutang Bukan Pajak	152,181	0	152,181	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	152,181	0	152,181	0.00
Persediaan	527,444,382	434,783,170	92,661,212	21.31
JUMLAH ASET LANCAR	4,294,288,297	1,469,201,943	2,825,086,354	192.29
ASET TETAP				
Tanah	1,089,000,068,000	1,089,000,068,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	105,624,980,694	92,877,000,717	12,747,979,977	13.73
Gedung dan Bangunan	324,256,099,222	335,299,814,950	(11,043,715,728)	(3.29)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	12,359,677,154	9,395,644,993	2,964,032,161	31.55
Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997	2,972,643,997	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7,244,043,489	6,958,045,430	285,998,059	4.11
AKUMULASI PENYUSUTAN	(108,231,686,992)	(96,521,081,709)	(11,710,605,283)	12.13
JUMLAH ASET TETAP	1,433,225,825,564	1,439,982,136,378	(6,756,310,814)	(0.47)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	2,665,859,833	2,537,559,833	128,300,000	5.06
Aset Lain-lain	7,521,589,928	8,310,389,928	(788,800,000)	(9.49)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(7,690,815,218)	(8,192,449,669)	501,634,451	(6.12)
JUMLAH ASET LAINNYA	2,496,634,543	2,655,500,092	(158,865,549)	(5.98)
JUMLAH ASET	1,440,016,748,404	1,444,106,838,413	(4,090,090,009)	(0.28)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	7,108,537,886	0	7,108,537,886	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	973,167,924	0	973,167,924	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	75,798,211	(75,798,211)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	934,794,017	0	934,794,017	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	8,256,162	0	8,256,162	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	9,024,755,989	75,798,211	8,948,957,778	11,806.29
JUMLAH KEWAJIBAN	9,024,755,989	75,798,211	8,948,957,778	11,806.29
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,430,991,992,415	1,444,031,040,202	(13,039,047,787)	(0.90)
JUMLAH EKUITAS	1,430,991,992,415	1,444,031,040,202	(13,039,047,787)	(0.90)
JUMLAH EKUITAS	1,430,991,992,415	1,444,031,040,202	(13,039,047,787)	(0.90)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,440,016,748,404	1,444,106,838,413	(4,090,090,009)	(0.28)

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM Tgl Data 08/08/22 9:23 PM
Tgl. Cetak 09/08/2022 8:20 AM
lap_neraca_percobaan_akrua1_es1 --SAKTI

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	637,800,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	296,994,017	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1,798,866,654	0
0.0	114115	Belanja Modal Dibayar Dimuka (prepaid)	1,034,418,773	0
0.0	114211	Uang Muka Belanja Pegawai (prepayment)	0	1,387,710
0.0	115212	Piutang Lainnya	152,181	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	455,805,247	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	67,288,685	0
0.0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
0.0	117131	Bahan Baku	4,250,000	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	100,450	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	1,089,000,068,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	105,624,980,694	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	324,256,099,222	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	10,348,938,854	0
0.0	134112	Irigasi	831,972,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,178,766,300	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	0	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	7,244,043,489	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	64,959,818,730
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	36,324,783,837
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	4,439,755,085
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	99,044,290
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	870,785,050
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	1,537,500,000
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	162151	Software	2,665,859,833	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	7,521,589,928	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	6,141,893,535
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,548,921,683
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	4,094,899,756
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	1,145,380,363
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	77,647,275
0.0	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	1,790,610,492
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	973,167,924
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM Tgl Data 08/08/22 9:23 PM

Tgl. Cetak 09/08/2022 8:20 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --SAKTI

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	934,794,017
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	8,256,162
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	88,200,397,046
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,153,456,637	0
0.0	391111	Ekuitas	0	1,444,031,040,202
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	474,376,693	0
0.0	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	1,924,000	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	2,200,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	79,529,678
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	353,043,950
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	106,866,695
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,686,378,996
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	14,060,509,456	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	223,554	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	2,434
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	885,537,584	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	233,652,662	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	591,265,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,177,422,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	97,637,025	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	723,258,540	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,536,733,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	382,975,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	311,751,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	6,932,852,567	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,788,430	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	641,490,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	496,254,444	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,465,082,800	0
3.0	521211	Beban Bahan	2,951,918,368	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	756,070,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	20,838,382,925	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,993,425,115	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,137,833,829	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,884,551	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	3,093,600	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,399,639,793	0
3.0	522141	Beban Sewa	4,013,216,219	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	7,050,129,990	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	765,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM Tgl Data 08/08/22 9:23 PM

Tgl. Cetak 09/08/2022 8:20 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --SAKTI

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	164,972,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,912,317,200	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,084,341,027	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,259,984,761	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	6,252,356,494	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	357,171,397	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	355,818,976	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7,019,670,209	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4,484,046,851	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	573,834,976	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	9,904,429	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	5,078,125	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	243,972,885	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	43,192,664	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	990,265,099	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	291,714,381	0
3.0	593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	5,252,500	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	30,000,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	16,552,100	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	50,000,730	0
JUMLAH			1,659,408,869,910	1,659,408,869,910

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM *Tgl Data 08/08/22 9:29 PM*

Tgl. Cetak 09/08/2022 8:20 AM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --SAKTI

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	88,200,397,046
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,153,456,637	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	2,200,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,579,286
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	353,043,950
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	106,866,695
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,686,378,996
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1,387,710
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	10,925,235,436	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	171,877	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	2,434
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	687,500,564	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	181,944,904	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	454,545,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	904,406,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	59,567,824	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	562,196,460	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,536,733,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	297,480,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	296,284,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6,040,183,662	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,788,430	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	641,490,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	494,663,773	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,428,166,450	0
3.0	521211	Belanja Bahan	2,893,517,388	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	750,670,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20,816,041,625	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,978,938,241	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	230,689,802	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	126,747,521	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	273,615,800	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,137,833,829	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	5,718,051	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	2,738,800	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,395,456,959	0
3.0	522141	Belanja Sewa	3,996,743,719	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	6,905,029,990	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	765,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	164,372,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl Data 08/08/22 9:29 PM

Tgl. Cetak 09/08/2022 8:20 AM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --SAKTI

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,912,317,200	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,689,418,527	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	569,719,956	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,222,942,842	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	6,064,479,283	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	335,271,397	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	355,818,976	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,202,989,410	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	207,822,784	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	321,613,000	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	128,300,000	0
JUMLAH			90,354,621,117	90,354,621,117

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LO.ES1
 Tanggal : 09/08/22 8:18 AM
 Halaman : 1
 Tgl Data : 8/8/22 9:30 PM
 Prog ID : lap_lo_es1 --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	432,573,628	1,110,628,470	(678,054,842)	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	432,573,628	1,110,628,470	(678,054,842)	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	432,573,628	1,110,628,470	(678,054,842)	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	20,000,962,387	18,219,610,659	1,781,351,728	-
Beban Persediaan	1,056,817,929	675,489,830	381,328,099	-
Beban Barang dan Jasa	54,763,586,831	34,598,175,391	20,165,411,440	-
Beban Pemeliharaan	5,636,040,169	5,001,241,792	634,798,377	-
Beban Perjalanan Dinas	6,965,346,867	12,474,999,454	(5,509,652,587)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	35,252,500	0	35,252,500	-
Beban Bunga	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LO.ES1
 Tanggal : 09/08/22 8:18 AM
 Halaman : 2
 Tgl Data : 8/8/22 9:30 PM
 Prog ID : lap_lo_es1 --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	12,379,700,139	8,871,204,595	3,508,495,544	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	100,837,706,822	79,840,721,721	20,996,985,101	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(100,405,133,194)	(78,730,093,251)	(21,675,039,943)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	2,200,000	79,141,388	(76,941,388)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2,200,000	79,141,388	(76,941,388)	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,793,245,691	627,899,258	1,165,346,433	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,793,245,691	627,899,258	1,165,346,433	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,795,445,691	707,040,646	1,088,405,045	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(98,609,687,503)	(78,023,052,605)	(20,586,634,898)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(98,609,687,503)	(78,023,052,605)	(20,586,634,898)	-

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



Waktu Olap: 2022-08-08 21:28:50.0 [B@29fbb035]

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 09/08/22 8:19 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_es1_komparatif--SAKTI

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	1,047,500,000	2,153,456,637	(1,105,956,637)	206	1,081,139,000	1,766,990,891	(685,851,891)	163
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1,047,500,000	2,153,456,637	(1,105,956,637)	206	1,081,139,000	1,766,990,891	(685,851,891)	163
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	33,122,266,000	15,906,062,631	17,216,203,369	48	29,523,295,000	18,219,610,659	11,303,684,341	62
	BELANJA BARANG	228,065,299,000	66,433,609,221	161,631,689,779	29	197,624,766,000	52,744,454,395	144,880,311,605	27
	BELANJA MODAL	22,994,575,000	5,860,725,194	17,133,849,806	25	189,946,516,000	21,938,227,204	168,008,288,796	12
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	284,182,140,000	88,200,397,046	195,981,742,954	31	417,094,577,000	92,902,292,258	324,192,284,742	22
C	PEMBIAYAAN				0				0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 09/08/22 8:21 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	2,200,000	0	2,200,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	60,000,000	3,579,286	0	3,579,286	5.97
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	60,000,000	5,779,286	0	5,779,286	9.63
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	987,500,000	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	987,500,000	0	0	0	0
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	353,043,950	0	353,043,950	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	353,043,950	0	353,043,950	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	106,866,695	0	106,866,695	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,686,378,996	0	1,686,378,996	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1,387,710	0	1,387,710	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	1,794,633,401	0	1,794,633,401	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,047,500,000	2,153,456,637	0	2,153,456,637	205.58
	JUMLAH PENDAPATAN	1,047,500,000	2,153,456,637	0	2,153,456,637	205.58

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/08/22 8:21 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --rekon17

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	19,392,760,000	19,838,539,000	10,925,235,436	0	10,925,235,436	55.07	8,913,303,564
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	390,000	397,000	171,877	2,434	169,443	42.68	227,557
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,585,896,000	1,570,979,000	687,500,564	0	687,500,564	43.76	883,478,436
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	346,271,000	351,449,000	181,944,904	0	181,944,904	51.77	169,504,096
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,015,150,000	1,015,150,000	454,545,000	0	454,545,000	44.78	560,605,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,651,450,000	1,671,195,000	904,406,000	0	904,406,000	54.12	766,789,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	145,123,000	145,881,000	59,567,824	0	59,567,824	40.83	86,313,176
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,191,079,000	1,184,294,000	562,196,460	0	562,196,460	47.47	622,097,540
511129	Belanja Uang Makan PNS	4,951,941,000	4,951,941,000	1,536,733,000	0	1,536,733,000	31.03	3,415,208,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	781,477,000	787,107,000	297,480,000	0	297,480,000	37.79	489,627,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	31,061,537,000	31,516,932,000	15,609,781,065	2,434	15,609,778,631	49.53	15,907,153,369
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	1,573,534,000	1,605,334,000	296,284,000	0	296,284,000	18.46	1,309,050,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,573,534,000	1,605,334,000	296,284,000	0	296,284,000	18.46	1,309,050,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	32,635,071,000	33,122,266,000	15,906,065,065	2,434	15,906,062,631	48.02	17216203369
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	11,352,933,000	13,988,996,000	6,040,183,662	0	6,040,183,662	43.18	7,948,812,338
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31,400,000	31,800,000	1,788,430	0	1,788,430	5.62	30,011,570
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,383,505,000	1,610,060,000	641,490,000	0	641,490,000	39.84	968,570,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,120,920,000	1,378,650,000	494,663,773	0	494,663,773	35.88	883,986,227
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,886,937,000	2,601,936,000	1,428,166,450	0	1,428,166,450	54.89	1,173,769,550
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	16,775,695,000	19,611,442,000	8,606,292,315	0	8,606,292,315	43.88	11,005,149,685
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	49,925,685,000	22,442,472,000	2,893,517,388	0	2,893,517,388	12.89	19,548,954,612
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,615,785,000	2,603,265,000	750,670,000	0	750,670,000	28.84	1,852,595,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	35,863,802,000	40,737,926,000	20,816,041,625	0	20,816,041,625	51.1	19,921,884,375
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	3,717,500,000	8,318,481,000	1,978,938,241	0	1,978,938,241	23.79	6,339,542,759
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	92,122,772,000	74,102,144,000	26,439,167,254	0	26,439,167,254	35.68	47,662,976,746
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	297,801,000	724,638,000	230,689,802	0	230,689,802	31.84	493,948,198
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	718,425,000	879,625,000	126,747,521	0	126,747,521	14.41	752,877,479
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	26,780,000	762,830,000	273,615,800	0	273,615,800	35.87	489,214,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,043,006,000	2,367,093,000	631,053,123	0	631,053,123	26.66	1,736,039,877

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/08/22 8:21 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --rekon17

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	2,142,000,000	2,244,000,000	1,137,833,829	0	1,137,833,829	50.71	1,106,166,171
522112	Belanja Langganan Telepon	54,720,000	54,720,000	5,718,051	0	5,718,051	10.45	49,001,949
522113	Belanja Langganan Air	11,400,000	14,400,000	2,738,800	0	2,738,800	19.02	11,661,200
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,576,611,000	4,839,111,000	4,395,456,959	0	4,395,456,959	90.83	443,654,041
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000
522141	Belanja Sewa	15,892,210,000	9,434,249,000	3,996,743,719	0	3,996,743,719	42.36	5,437,505,281
522151	Belanja Jasa Profesi	30,897,500,000	30,932,650,000	6,905,029,990	765,000	6,904,264,990	22.32	24,028,385,010
522191	Belanja Jasa Lainnya	865,032,000	823,889,000	164,372,000	0	164,372,000	19.95	659,517,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4,113,847,000	3,908,331,000	1,912,317,200	0	1,912,317,200	48.93	1,996,013,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	58,553,320,000	52,321,350,000	18,520,210,548	765,000	18,519,445,548	35.4	33,801,904,452
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,333,965,000	12,658,636,000	3,689,418,527	0	3,689,418,527	29.15	8,969,217,473
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	922,055,000	1,012,740,000	569,719,956	0	569,719,956	56.26	443,020,044
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,453,479,000	2,925,838,000	1,222,942,842	0	1,222,942,842	41.8	1,702,895,158
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,500,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	8,716,999,000	16,597,214,000	5,482,081,325	0	5,482,081,325	33.03	11,115,132,675
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	62,697,438,000	55,648,504,000	6,064,479,283	0	6,064,479,283	10.9	49,584,024,717
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,956,990,000	2,762,390,000	335,271,397	0	335,271,397	12.14	2,427,118,603
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	226,824,000	0	0	0	0	226,824,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,201,849,000	4,428,338,000	355,818,976	0	355,818,976	8.04	4,072,519,024
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	68,856,277,000	63,066,056,000	6,755,569,656	0	6,755,569,656	10.71	56,310,486,344
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	246,068,069,000	228,065,299,000	66,434,374,221	765,000	66,433,609,221	29.13	161631689779
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,479,000,000	12,271,065,000	5,202,989,410	0	5,202,989,410	42.4	7,068,075,590
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	5,479,000,000	12,271,065,000	5,202,989,410	0	5,202,989,410	42.4	7,068,075,590
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	9,368,427,000	207,822,784	0	207,822,784	2.22	9,160,604,216
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	335,800,000	321,613,000	0	321,613,000	95.78	14,187,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	9,704,227,000	529,435,784	0	529,435,784	5.46	9,174,791,216
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	0	1,019,283,000	128,300,000	0	128,300,000	12.59	890,983,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	0	1,019,283,000	128,300,000	0	128,300,000	12.59	890,983,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/08/22 8:21 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --rekon17

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	5,479,000,000	22,994,575,000	5,860,725,194	0	5,860,725,194	25.49	17133849806
	JUMLAH BELANJA	284,182,140,000	284,182,140,000	88,201,164,480	767,434	88,200,397,046	31.04	195,981,742,954

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/08/22 8:21 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,886,937,000	2,601,936,000	1,428,166,450	0	1,428,166,450	54.89	1,173,769,550
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,886,937,000	2,601,936,000	1,428,166,450	0	1,428,166,450	54.89	1,173,769,550
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3,717,500,000	8,318,481,000	1,978,938,241	0	1,978,938,241	23.79	6,339,542,759
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,717,500,000	8,318,481,000	1,978,938,241	0	1,978,938,241	23.79	6,339,542,759
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	26,780,000	762,830,000	273,615,800	0	273,615,800	35.87	489,214,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	26,780,000	762,830,000	273,615,800	0	273,615,800	35.87	489,214,200
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4,113,847,000	3,908,331,000	1,912,317,200	0	1,912,317,200	48.93	1,996,013,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	4,113,847,000	3,908,331,000	1,912,317,200	0	1,912,317,200	48.93	1,996,013,800
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	10,745,064,000	15,591,578,000	5,593,037,691	0	5,593,037,691	35.87	9998540309
	JUMLAH BELANJA	10,745,064,000	15,591,578,000	5,593,037,691	0	5,593,037,691	35.87	9,998,540,309

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN TAHUN 2021
(dalam rupiah)**



Tgl Data : 08/08/22 9:30 PM

Kode Lap : Lpe.es1

Tanggal : 09/08/22 8:19 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_es1-SAKTI

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I**

: 013
: 12

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MA**

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,444,031,040,202	1,342,991,582,367	101,039,457,835	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(98,609,687,503)	(78,023,052,605)	(20,586,634,898)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(476,300,693)	(1,179,784,565)	703,483,872	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	(1,924,000)	(5,512,500)	3,588,500	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(474,376,693)	(1,174,547,065)	700,170,372	-
LAIN-LAIN	0	275,000	(275,000)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	86,046,940,409	94,725,918,087	(8,678,977,678)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(13,039,047,787)	15,523,080,917	(28,562,128,704)	-
EKUITAS AKHIR	1,430,991,992,415	1,358,514,663,284	72,477,329,131	-

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
BULANAN
2022

Tanggal : 09/08/2022

Halaman : 1 dari 4

Kode Lap : LBSISSKT

NAMA UAPPB-E1 : 01312 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2022		MUTASI				SALDO PER 30-JUNI-2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		195,275	1,089,000,068,000	0	0	0	0	195,275	1,089,000,068,000
2.01.01	TANAH PERSIL		195,275	1,089,000,068,000	0	0	0	0	195,275	1,089,000,068,000
132111	Peralatan dan Mesin		13,963	92,877,000,717	807	13,604,285,977	3	856,306,000	14,767	105,624,980,694
3.01.01	ALAT BESAR DARAT		7	221,856,000	0	0	0	0	7	221,856,000
3.01.03	ALAT BANTU		48	1,479,582,820	9	197,980,000	0	0	57	1,677,562,820
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		64	9,729,975,500	3	983,271,250	3	856,306,000	64	9,856,940,750
3.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		13	41,858,000	0	0	0	0	13	41,858,000
3.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR		2	54,450,000	0	0	0	0	2	54,450,000
3.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN		26	95,825,000	0	0	0	0	26	95,825,000
3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		3	6,150,000	6	240,309,700	0	0	9	246,459,700
3.03.03	ALAT UKUR		2	53,677,000	0	0	0	0	2	53,677,000
3.04.01	ALAT PENGOLAHAN		9	34,083,005	0	0	0	0	9	34,083,005
3.05.01	ALAT KANTOR		1,634	10,414,349,650	197	942,165,000	0	0	1,831	11,356,514,650
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		9,364	36,705,899,061	464	6,071,343,700	0	0	9,828	42,777,242,761
3.06.01	ALAT STUDIO		294	7,770,517,594	7	3,927,279,467	0	0	301	11,697,797,061
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		180	1,273,858,925	0	0	0	0	180	1,273,858,925
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR		23	241,036,800	0	0	0	0	23	241,036,800
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		366	1,039,508,000	4	14,995,000	0	0	370	1,054,503,000
3.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM		5	26,776,000	0	0	0	0	5	26,776,000
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM		44	705,180,500	0	0	0	0	44	705,180,500
3.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR		4	4,725,000	0	0	0	0	4	4,725,000
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA		51	546,704,700	14	28,000,000	0	0	65	574,704,700
3.08.07	PERALATAN LABORATORIUM		3	473,597,400	0	0	0	0	3	473,597,400

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
BULANAN
2022

Tanggal : 09/08/2022

Halaman : 2 dari 4

Kode Lap : LBSISSKT

NAMA UAPPB-E1 : 01312 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2022		MUTASI				SALDO PER 30-JUNI-2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HYDRODINAMICA										
3.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN		20	200,649,500	0	0	0	0	20	200,649,500
3.10.01	KOMPUTER UNIT		1,144	16,547,359,089	48	920,983,860	0	0	1,192	17,468,342,949
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		589	4,099,545,673	55	277,958,000	0	0	644	4,377,503,673
3.13.01	SUMUR		9	151,957,000	0	0	0	0	9	151,957,000
3.15.03	ALAT SAR		5	262,223,100	0	0	0	0	5	262,223,100
3.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN		9	239,132,000	0	0	0	0	9	239,132,000
3.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI		7	210,264,000	0	0	0	0	7	210,264,000
3.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT		2	46,750,000	0	0	0	0	2	46,750,000
3.19.01	PERALATAN OLAH RAGA		36	199,509,400	0	0	0	0	36	199,509,400
133111	Gedung dan Bangunan		59	335,299,814,950	2	30,439,579,823	0	41,483,295,551	61	324,256,099,222
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		38	260,603,835,920	2	30,242,699,823	0	41,483,295,551	40	249,363,240,192
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		17	63,399,897,681	0	196,880,000	0	0	17	63,596,777,681
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS		4	11,296,081,349	0	0	0	0	4	11,296,081,349
134111	Jalan dan Jembatan		15,687	7,384,906,693	0	2,964,032,161	0	0	15,687	10,348,938,854
5.01.01	JALAN		15,687	7,384,906,693	0	2,964,032,161	0	0	15,687	10,348,938,854
134112	Irigasi		1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
5.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT		1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
134113	Jaringan		5	1,178,766,300	0	0	0	0	5	1,178,766,300
5.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK		2	406,250,000	0	0	0	0	2	406,250,000
5.03.10	INSTALASI LAIN		3	772,516,300	0	0	0	0	3	772,516,300
135121	Aset Tetap Lainnya		9,043	2,972,643,997	0	0	0	0	9,043	2,972,643,997
6.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		8,706	1,381,923,997	0	0	0	0	8,706	1,381,923,997
6.01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		1	48,220,000	0	0	0	0	1	48,220,000

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
BULANAN
2022

Tanggal : 09/08/2022

Halaman : 3 dari 4

Kode Lap : LBSISSKT

NAMA UAPPB-E1 : 01312 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2022		MUTASI				SALDO PER 30-JUNI-2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN		335	1,537,500,000	0	0	0	0	335	1,537,500,000
6.02.02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN		1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		1,338	8,310,389,928	0	0	4	788,800,000	1,334	7,521,589,928
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		22	2,269,616,646	0	0	4	788,800,000	18	1,480,816,646
3.05.01	ALAT KANTOR		220	2,033,429,282	0	0	0	0	220	2,033,429,282
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		854	436,809,966	0	0	0	0	854	436,809,966
3.06.01	ALAT STUDIO		9	10,957,650	0	0	0	0	9	10,957,650
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		12	36,818,500	0	0	0	0	12	36,818,500
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		3	3,242,000	0	0	0	0	3	3,242,000
3.10.01	KOMPUTER UNIT		115	1,100,818,774	0	0	0	0	115	1,100,818,774
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		21	19,633,882	0	0	0	0	21	19,633,882
3.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI		1	18,635,000	0	0	0	0	1	18,635,000
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		2	531,865,216	0	0	0	0	2	531,865,216
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		9	1,394,712,000	0	0	0	0	9	1,394,712,000
6.02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN		70	453,851,012	0	0	0	0	70	453,851,012

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
BULANAN
2022

Tanggal : 09/08/2022

Halaman : 4 dari 4

Kode Lap : LBSISSKT

NAMA UAPPB-E1 : 01312 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2022		MUTASI				SALDO PER 30-JUNI-2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL				1,537,855,562,585		47,007,897,961		43,128,401,551		1,541,735,058,995

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
SEMESTERAN
2022

Tanggal : 06/09/2022

Halaman : 1 dari 2

Kode Lap : LBSESSKT

NAMA UAPPB-E1 : 01312 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2022		MUTASI				SALDO PER 30-JUNI-2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		4,199	1,485,656,607	4	1,924,000	0	0	4,203	1,487,580,607
3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		1	125,000	0	0	0	0	1	125,000
3.04.01	ALAT PENGOLAHAN		1	700,000	0	0	0	0	1	700,000
3.05.01	ALAT KANTOR		789	151,618,750	4	1,924,000	0	0	793	153,542,750
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		3,148	1,208,602,971	0	0	0	0	3,148	1,208,602,971
3.06.01	ALAT STUDIO		52	35,819,248	0	0	0	0	52	35,819,248
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		35	13,762,500	0	0	0	0	35	13,762,500
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		23	14,951,358	0	0	0	0	23	14,951,358
3.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM		22	13,180,000	0	0	0	0	22	13,180,000
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		36	27,708,280	0	0	0	0	36	27,708,280
3.15.03	ALAT SAR		1	918,500	0	0	0	0	1	918,500
3.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT		80	15,920,000	0	0	0	0	80	15,920,000
3.19.01	PERALATAN OLAH RAGA		11	2,350,000	0	0	0	0	11	2,350,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		15	2,225,010	0	0	0	0	15	2,225,010
3.05.01	ALAT KANTOR		4	2,000,000	0	0	0	0	4	2,000,000
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		1	225,000	0	0	0	0	1	225,000
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		10	10	0	0	0	0	10	10

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
SEMESTERAN
2022

Tanggal : 06/09/2022

Halaman : 2 dari 2

Kode Lap : LBSESSKT

NAMA UAPPB-E1 : 01312 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2022		MUTASI				SALDO PER 30-JUNI-2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL				1,487,881,617		1,924,000		0		1,489,805,617